TINGKAT KONDISI DAN KEBERADAAN FASILITAS PELABUHAN PERIKANAN DI PULAU JAWA

(Condition and Existence of Fishing Ports in Java)

Oleh:

Ernani Lubis[1)] dan Anwar Bey Pane[2)]

ABSTRACT

Have been obtained group of fishing port facilities which are the character of ***absolute / " vital", important and complement*** *from fishing ports in Java. Pursuant to the facility group, have been concluded by the existence of fishing ports which are the including good category, enough and ugly. According to got category percentage, in this time, Java not yet to equip their ports correctly assumed can face the increasing of the fisheries sector either in Java and also outside Java. Remarkable addition to the number of the fishing fleet in Java is not made balance, for example, with the quay development, ice plant, tank water, fuel tank, workshop and loading provision.*

Keywords : fishing port, facility, Java

ABSTRAK

Telah diperoleh kelompok fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan yang bersifat **mutlak/"vital", penting** dan **pelengkap** dari pelabuhan-pelabuhan perikanan di Pulau Jawa. Berdasarkan kelompok fasilitas tersebut, telah disimpulkan adanya pelabuhan-pelabuhan perikanan yang termasuk kategori baik, cukup dan buruk. Menurut persentase kategori yang didapatkan, Pulau Jawa saat ini belum mempunyai kelengkapan fasilitas kepelabuhanan yang dipandang mampu menghadapi meningkatnya sektor perikanan tangkap baik di Jawa maupun di luar Jawa. Penambahan armada yang luar biasa banyaknya di Jawa tidak diimbangi antara lain dengan pembangunan dermaga, pabrik es, pengadaan tangki air, tangki bahan bakar, bengkel reparasi dan toko yang menyediakan kebutuhan melaut.

Kata kunci : pelabuhan perikanan, fasilitas, Pulau Jawa

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kegiatan perikanan tangkap yang luar biasa cepatnya di Pulau Jawa, terutama di pantai Utara Jawa, dan sedikitnya jumlah pelabuhan yang difasilitasi dengan baik telah menjadikan semakin berkembangnya perahu-perahu kecil yang kiranya cukup melakukan pendaratan di pantai-pantai atau di muara-muara sungai. Muara-muara sungai kecil ini merupakan tempat berlabuh sederhana dan aman bagi sekelompok besar perahu-perahu yang seringkali melakukan penangkapan ikan hanya beberapa jam dalam sehari.

Banyak pangkalan pendaratan ikan (PPI) yang hanya dilengkapi dengan fasilitas gedung tempat pelelangan ikan TPI) saja. Sebagian besar TPI tidak berfungsi untuk lelang ikan, terutama yang berada di Pantai Utara Jawa Barat serta kondisinya yang kurang hiegenis sebagai contoh ikan digelar di lantai atau di dalam tong plastik yang kualitas dan kebersihannya kurang sehingga dengan cepat terjadi pembusukan ikan oleh bakteri dan ikan kehilangan sebagian besar nilai jualnya..

---

[1] *Staf Pengajar Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP)-FPIK IPB (Kepala Bagian Pelabuhan Perikanan PSP, Email: ernani_ipb@yahoo.com)*

[2] *Staf Pengajar Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP) FPIK IPB.*

1.2 Tujuan

(1) Mendapatkan gambaran keberadaan dan kondisi pelabuhan perikanan di Pulau Jawa;

(2) Mengetahui tingkat keberadaan fasilitas-fasilitas kepelabuhanan perikanan berdasarkan pada hasil pengelompokan dan persentase keberadaannya.

1.3 Manfaat

(1) Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Pusat dan Daerah tentang kondisi dan keberadaan fasilitas pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan di Pulau Jawa

(2) Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan pengembangan dan pengelolaan fasilitas pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan di Pulau Jawa.

2 METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode survei ke seluruh pelabuhan dan pangkalan pendaratan ikan yang berada di Pulau Jawa. Aspek yang diteliti adalah tentang kondisi dan keberadaan fasilitas baik jenis maupun pemanfaatannya. Kasus diambil di Pulau Jawa karena hampir 70 % PP dan PPI ada di Pulau Jawa. Analisis dilakukan secara deskriptif setelah dilakukannya pengelompokan fasilitas PP dan PPI dan pengkategoriannya. Pengelompokan fasilitas akan dilakukan berdasarkan pada kepentingan terhadap kebutuhan pengoperasian suatu pelabuhan perikanan secara ideal di Indonesia, yaitu **mutlak/"vital"**, **penting** dan **pelengkap**, sedangkan pengkategorian baik, cukup dan buruk adalah berdasarkan pada keberadaan fasilitas yang dimiliki oleh PP dan PPI saat ini menurut setiap kelompok fasilitas di atas.

3 HASIL

Fasilitas-fasilitas yang maksimum dimiliki oleh pelabuhan perikanan di P. Jawa adalah 24 jenis yaitu dermaga pendaratan, dermaga perbekalan, kolam pelabuhan, *breakwater, jetty,* turap, alat bantu navigasi, tempat pelelangan ikan, bengkel, kantor PP/PPI, kantor syahbandar, *transit sheet*, pabrik es, tangki air + instalasi, tangki BBM, genset + instalasi, *slipway*, tempat istirahat nelayan, SSB, gedung pengepakan, rumah staf, tempat ibadah, kendaraan dinas roda 2, kendaraan dinas roda 4.

Diantara fasilitas yang mutlak diperlukan dan mempunyai peranan penting untuk fungsi kepelabuhanan adalah kolam pelabuhan, dermaga pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan. Secara keseluruhan di Pulau Jawa, terdapat 30 PP dan 204 PPI yang mempunyai aktivitas. Berdasarkan pada penyebaran fasilitasnya, mempelihatkan bahwa 5 diantara 30 pelabuhan perikanan tidak mempunyai dermaga pendaratan ikan (17%), dan 13 diantaranya tidak mempunyai kolam pelabuhan (43%). Mengenai PPI-PPI nya, kekurangan fasilitas itu tampak lebih jelas sebab 128 dari 204 PPI tidak memiliki dermaga pendaratan ikan (63%), dan 175 diantaranya (86%) tidak memiliki kolam pelabuhan (Gambar 1).

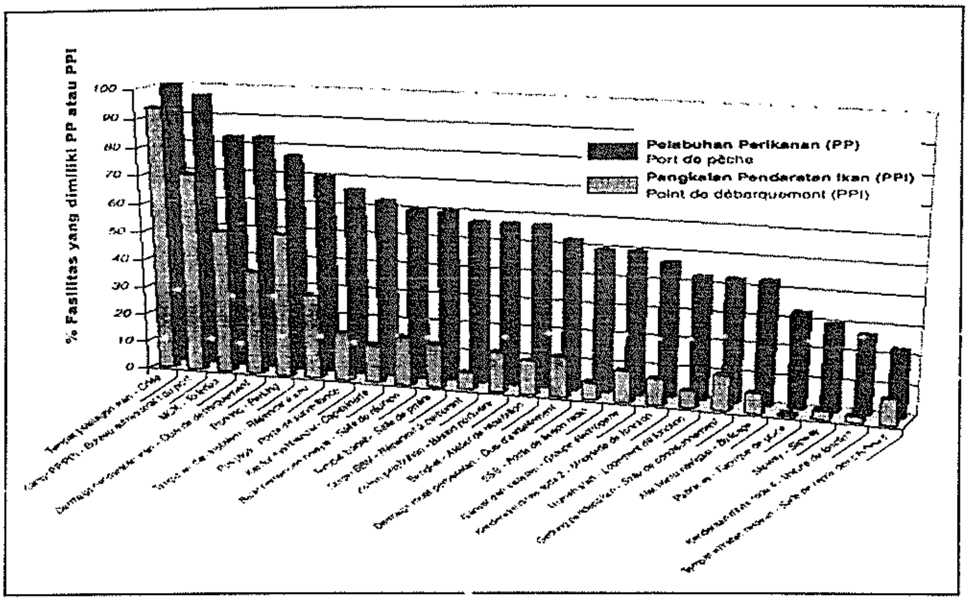

Sumber Lubis, E. et all. 2005

Gambar 1. Persentase (%) fasilitas kepelabuhanan perikanan di PP dan PPI di Pulau Jawa.

Ketiadaan fasilitas itu sangat menyulitkan tugas para nakhoda dan ABK. Mereka terpaksa menambatkan kapal/perahunya dalam beberapa deretan, seringkali jauh dari dermaga atau bahkan harus meninggalkan zona pelabuhan hanya untuk berlabuh di pantai, mengalami banyak kesulitan untuk melakukan persiapan melaut (bahan makanan, bahan bakar, es, dsb), mendaratkan hasill tangkapan dan mengirimkannya sampai ke tempat pelelangan ikan dalam kondisi hiegienis dan keamanan yang baik.

4 PEMBAHASAN

Pada dasarnya fasilitas yang dimiliki oleh PP adalah sama dengan fasilitas yang dimiliki oleh PPI, hanya kapasitas fasilitasnya yang berbeda, Menurut Lubis, E et all, 2005 bahwa berdasarkan pada kepentingannya terhadap kebutuhan pengoperasian suatu pelabuhan perikanan secara ideal maka terdapat 9 unsur yang termasuk dalam kategori fasilitas pelabuhan perikanan yang **"mutlak diperlukan"** atau **"vital"**, yakni: 1). Dermaga pendaratan ikan dan muat, 2). Kolam pelabuhan, 3). Sistem rambu-rambu yang mengatur keluar masuknya kapal, 4). Tempat pelelangan ikan, 5). Pabrik es, 6). Tangki dan instalasi air, 7). Tempat penyediaan bahan bakar, 8). Bengkel reparasi kapal, 9). Kantor administrasi.

Selanjutnya berdasarkan pada keberadaan fasilitas yang dimiliki oleh PP dan PPI saat ini dapat disimpulkan: 1). PP dan PPI yang termasuk dalam kategori "baik" dalam kelompok fasilitas"vital" yakni memiliki kesembilan fasilitas tersebut. 2). PP atau PPI "yang termasuk kategori "cukup" yaitu yang memiliki fasilitas 1 sampai 6 dari kelompok fasilitas"vital" tersebut, sekurang-kurangnya memiliki fasilitas tempat pelelangan ikan atau dermaga pendaratan ikan. 3). PP dan PPI yang termasuk kategori "buruk" hanya memiliki 3 fasilitas "vital" saja, kecuali jika pelabuhan-pelabuhan itu memiliki tempat pelelangan ikan dan dermaga pendaratan ikan, dalam hal itu dimasukkan dalam kategori sebelumnya (pelabuhan yang memiliki fasilitas kategori "cukup").

Tabel 1. Kategori Fasilitas PP dan PPI di P. Jawa yang **"mutlak diperlukan"** atau **"vital"**

Kategori	**Jumlah PP**	**% PP**	**Jumlah PPI**	**% PPI**
Baik	5 dari 30	17	0 dari 204	0
Cukup	22 dari 30	73	83 dari 204	41
Buruk	3 dari 30	10	121 dari 204	59

Jumlah pelabuhan yang termasuk kategori baik sangat kecil (hanya 5 PP). Sebagian besar PP termasuk kategori cukup (73%), tetapi mayoritas PPI termasuk kategori "buruk" (59%) (Tabel 1). Inilah salah satu hasil penelitian tersebut. Sektor perikanan tangkap yang di Indonesia diharapkan memegang peranan penting pada tahun-tahun mendatang, saat ini belum cukup memiliki prasarana dan sarana yang layak sehingga mutlak diperlukan untuk pengembangannya. Dari 24 jenis fasilitas yang dijadikan pedoman dalam penelitian lapangan ini masih banyak yang belum tersedia di pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan di Pulau Jawa.. Di pelabuhan, tempat pelelangan ikan (TPI) merupakan satu-satunya fasilitas yang tersedia di semua lokasi (100%). Sebanyak 75% (3 dari 4 pelabuhan yang memiliki 5 dari 24 jenis fasilitas, dan lebih mengkhawatirkan lagi berada pada persentase 50% (artinya 1 di antara 2 pelabuhan) yang memiliki 9 dari 24 fasilitas. Fasilitas-fasilitas yang ada tersebut saat ini kondisinya masih sangat sederhana, terutama pabrik es, hanya 33% dari pelabuhan-pelabuhan itu yang memilikinya, sedangkan *slipways* hanya 30%, dan sistem rambu-rambu navigasi hanya 43%.

Keadaan fasilitas lebih mengkhawatirkan lagi pada PPI. Hanya 4 dari 24 fasilitas yang dimiliki oleh 50% PPI. Sebanyak 18 jenis fasilitas tidak dimiliki oleh lebih dari 80% PPI, beberapa diantaranya bahkan sangat "vital" agar PPI itu dapat berfungsi dengan baik: kolam pelabuhan (tidak dimiliki oleh 86% PPI), penyediaan bahan bakar (tidak dimiliki oleh 94% PPI) dan pabrik es (tidak dimiliki 99 % PPI).

Fasilitas dalam kelompok fasilitas **"penting"**, adalah fasilitas yang jelas diperlukan agar PP dan PPI dapat berfungsi dengan baik, namun realisasinya dapat ditunda. Fasilitas **"penting"** itu adalah: 1). Generator listrik, 2). Kantor kepala pelabuhan, 3). Tempat parkir, 4). Pos penghubung radio (SSB), 5). Ruang pengepakan.

Kelompok PP dan PPI yang termasuk dalam kategori "baik" adalah PP atau PPI yang memiliki kelima fasilitas "penting" tersebut di atas. Termasuk kelompok kategori "cukup" adalah PP dan PPI yang memiliki 3 atau 4 fasilitas penting tersebut. Tergolong dalam kategori "buruk", merupakan PP atau PPI yang memiliki maksimum 2 fasilitas "penting" itu.

Tebel 2. Kategori Fasilitas PP dan PPI di Pulau Jawa yang termasuk kategori **"penting"**

Kategori	**Jumlah PP**	**% PP**	**Jumlah PPI**	**% PPI**
Baik	5 dari 30	17	2 dari 204	1
Cukup	11 dari 30	37	18 dari 204	9
Buruk	14 dari 30	46	184 dari 204	90

Kelompok fasilitas **"pelengkap"** adalah fasilitas yang diperlukan agar pelabuhan perikanan dapat berfungsi dengan baik, tetapi pengadaannya baru pada pengembangan pelabuhan tahap ketiga. Fasilitas "pelengkap" ini meliputi: 1). Dermaga muat terpisah, 2). *Slipway*, 3). Ruang pertemuan, 4). Kamar kecil, 5). Pos penjagaan, 6). Balai pertemuan nelayan, 7. Rumah dinas, 8). Mushola, 9). Mobil dinas, 10). Motor dinas.

Dilihat dari keberadaan fasilitas "pelengkap", termasuk: 1). "kategori baik", PP atau PPI yang memiliki kesepuluh fasilitas "pelengkap"di atas, 2). "kategori cukup", PP dan PPI yang memiliki 4 sampai dengan 9 fasilitas tersebut, 3). "kategori buruk", PP dan PPI yang maksimum hanya memiliki 3 fasilitas di atas.

Tabel 3. Kategori Fasilitas PP dan PPI di P. Jawa yang dinyatakan **"pelengkap"**.

Kategori	**Jumlah PP**	**% PP**	**Jumlah PPI**	**% PPI**
Baik	2 dari 30	7	0 dari 204	0
Cukup	16 dari 30	53	19 dari 204	9
Buruk	12 dari 30	40	183 dari 204	90

Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa untuk kedua kelompok fasilitas **"penting"** di satu sisi, dan fasilitas **"pelengkap"** di sisi lain, menunjukkan masih kurangnya pengelolaan PPI tampak sangat jelas. Adanya 90% dari PPI di Pulau Jawa yang masih termasuk "kategori buruk" untuk fasilitas **"penting"** dan **"pelengkap"** (Tabel 2 dan 3), merupakan suatu jumlah yang besar sekali, dan berarti adanya kesulitan yang begitu besar bagi nelayan dalam melakukan kegiatan-kegiatannya di PPI.

Situasi 30 pelabuhan perikanan itu juga sangat tidak menentu karena hampir setengah dari jumlah pelabuhan-pelabuhan perikanan yang ada termasuk "kategori buruk". Perpindahan pengelolaan PP atau PPI dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (propinsi dan atau kabupaten/kota) dapat mengakibatkan semakin meredupnya PP dan PPI yang terletak di daerah-daerah, yang sumber pendanaan dan sumberdaya manusianya sangat terbatas.

Kajian mengenai infrastruktur pelabuhan perikanan yang telah dilakukan, memperlihatkan secara jelas bahwa Pulau Jawa saat ini belum mempunyai kelengkapan fasilitas kepelabuhanan yang dipandang mampu menghadapi meningkatnya sektor perikanan tangkap baik di Jawa maupun di luar Jawa. Penambahan armada yang luar biasa banyaknya di Jawa tidak diimbangi dengan pembangunan dermaga, pabrik es, pengadaan tangki air, tangki bahan bakar, bengkel reparasi, toko yang menyediakan kebutuhan melaut dsb, yang akan memungkinkan ribuan nelayan kecil mendaratkan hasil tangkapannya dengan mutu yang baik, juga para pedagang dan pengolah ikan untuk meningkatkan nilai tambahnya.

Belum lengkapnya fasilitas kepelabuhanan perikanan akan berpengaruh terhadap kualitas hasil tangkapan yang didaratkan. Di Perancis, misalnya kelengkapan fasilitas sangat terlihat walaupun untuk pelabuhan perikanan skala kecil. Dengan kata lain, hampir seluruh fasilitas baik vital, penting maupun pelengkap ada pada setiap pembangunan pelabuhan perikanan bahkan sudah dilakukan mekanisasi pada fasilitas-fasilitas tertentu untuk mempercepat kegiatannya misalnya fasilitas untuk penyortiran ikan, pencucian tempat ikan, penyaluran ikan dari kapal ke dermaga dan dari dermaga ke TPI, sehingga mutu hasil tangkapan didaratkan terjaga kualitasnya. Standar inilah hendaknya dapat terwujud untuk pelabuhan perikanan di Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Seperti halnya yang telah dikatakan oleh Chaussade, J. 1984, di pelabuhan-pelabuhan perikanan Perancis, pemerintah sudah sejak lama memperhatikan tentang fasilitas-fasilitas pelabuhan bahkan telah tersedia modernisasi fasilitas penyortiran, penimbangan dan fasilitas elektronik untuk aktivitas pelelangan ikan yang kesemuanya bertujuan agar ikan dapat ditangani secara cepat.

Selain itu, lingkungan pelabuhan perikanan saat ini terancam oleh banyaknya endapan yang melanda sejumlah besar tempat lokasi di Pantai Utara Jawa, terutama di muara sungai, tepatnya di tempat berkumpulnya sejumlah perahu yang mendaratkan hasil tangkapannya sepanjang hari. Nelayan-nelayan itu terpaksa berlabuh jauh dari tepi pantai, dan mendaratkan ikannya dalam kondisi yang sangat sulit. Hal itu tentu saja menurunkan kualitas ikan yang didaratkannya.

Kondisi sanitasi hampir di seluruh pelabuhan di Pulau Jawa juga merupakan salah satu problem yang sampai saat ini belum terpecahkan, hal ini dapat diakibatkan oleh masih rendahnya kualitas ikan ketika didaratkan, banyaknya potongan-potongan ikan di lantai TPI, saluran-saluran yang mampet, banyaknya sampah berceceran di lingkungan pelabuhan, semuanya akan menambah suramnya kompetisi kondisi pelabuhan perikanan kita dengan pelabuhan negara lain. Sebagai contoh pelabuhan-pelabuhan perikanan di Eropa telah mempunyai standar baku berdasarkan peraturan Uni Eropa yang sudah berjalan sejak 22/07/1991 berkaitan dengan aturan kebersihan di atas kapal/*hygiene rules for fishermen on board*; kondisi pengawetan ikan di atas kapal/*conditions for preservation of fish on board*, kondisi penanganan ikan ketika didaratkan/*conditions for handling on shore* dan kondisi pengolahan dan pengepakan/*conditions for processing and packing*.

Pemerintah telah melakukan upaya-upaya yang terpuji untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut di atas secara bertahap, tetapi masih banyak lagi hal-hal yang harus dilakukan untuk menata kebijakan yang benar-benar diharapkan untuk pengembangan sektor perikanan tangkap khususnya pelabuhan perikanannya.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

(1) Jumlah dan aktivitas PP dan PPI di Pulau Jawa, belum mencerminkan gambaran perkembangan kemajuan aktivitas perikanan tangkapnya secara kualitatif dan nyata, disebabkan oleh dua hal yaitu lemahnya fasilitas kepelabuhanan perikanan dan kelemahan dalam pengelolaan dan pengorganisasian kepelabuhanan perikanan.

(2) Sebagian besar kelompok fasilitas PP yang termasuk **mutlak diperlukan/"vital"**, dengan kategori baik jumlahnya sangat kecil (hanya 5 PP). Sebagian besar PP termasuk kategori cukup (73%), tetapi mayoritas PPI termasuk kategori "buruk" (59%). Adapun untuk kelompok fasilitas **"penting"** di satu sisi, dan fasilitas **"pelengkap"** di sisi lain, menunjukkan kurangnya pengelolaan PPI tampak sangat jelas yang diindikasikan 90% dari PPI di Pulau Jawa masih termasuk "kategori buruk" untuk fasilitas **"penting"** dan **"pelengkap.**

5.2 Saran

(1) Diperlukan pengadaan fasilitas PP dan PPI untuk menjamin kondisi yang lebih baik lagi bagi peningkatan keseluruhan aktivitas kepelabuhanan perikanan; peningkatan kemampuan pengelolaan dan pengorganisasian kepelabuhanan perikanan yang efektif dan efisien melalui penyediaan sumberdaya manusia yang lebih handal dan berbagai pelatihan kepelabuhanan perikanan,

(2) Diperlukan penerapan standarisasi fasilitas yang seharusnya dimiliki oleh PP dan PPI agar pelabuhan dapat berfungsi secara optimal sehingga hasil tangkapan yang didaratkan dan didistribusikan tetap mempunyai mutu yang baik . Selain itu juga agar pelabuhan perikanan dapat berperan secara lebih nyata lagi untuk berkembangnya industri perikanan tangkap termasuk industri pengolahan ikan di pelabuhan-pelabuhan perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

Lubis, E, A.B. Pane, Y. Kurniawan, J. Chaussade, P. Pottier dan C. Lamberts. 2005. Atlas Perikanan Tangkap dan Pelabuhan Perikanan di Pulau Jawa. Kerjasama antara PK2PTM-LPPM-IPB dengan Université de Nantes dan CNRS-Nantes. France.

Chaussade, Jean, 1998. Les difficultés de la pêche industrielle en France: l'exemple de Lorient. Norois No. 121, 31 année (La France et la gestion du milieu marin et côtier, Janvier-Mars 1984). France